

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Suasana konflik di Timur Tengah dari waktu ke waktu seakan tak pernah surut. Timur Tengah memiliki potensi konflik yang cukup kompleks, baik dari permasalahan antara suku, golongan maupun agama (Islam, Kristen, Yahudi), antara negara (mengenai perbedaan ekonomi) serta berbagai masalah yang lain. Permasalahan yang seolah tiada hentinya itu ditambah lagi dengan berdirinya negara Israel di tanah Arab (warga Palestina), yang mengakibatkan orang-orang Arab (warga Palestina) terusir dari tanah airnya. Aksi teror yang dilancarkan Israel bertujuan untuk mengusir orang-orang Arab Palestina dari kampung halamannya, sehingga tanah pemukiman orang-orang Arab Palestina bisa dipakai sebagai tempat pemukiman orang Israel. Hal ini mengakibatkan orang-orang Palestina seakan menjadi pengungsi di tanah airnya sendiri.

Sebenarnya konflik Arab-Israel dan kerawanan kawasan Timur Tengah disebabkan oleh konflik Palestina-Israel. Konflik ini berlangsung secara abadi, bahkan tumbuh anggapan bahwa sebelum Israel memberikan otoritas dan pengakuan penuh pada Palestina, maka Timur Tengah tidak akan mengenal perdamaian. Selama konflik Palestina-Israel terjadi, banyak bermunculan organisasi-organisasi yang berjuang demi kemerdekaan Palestina, antara lain PLO, Hamas, Jihad Islam. Selain itu juga banyak tokoh-tokoh yang ikut berperan

dalam perjuangan Palestina seperti Yasser Arafat. Yasser Arafat merupakan presiden otoritas Palestina. Ia selalu berusaha untuk memperjuangkan Palestina.

Selain Yasser Arafat, ada seorang tokoh yang beberapa tahun terakhir ini sering menjadi pembicaraan dan perhatian khalayak ramai yaitu Syaikh Ahmad Yasin. Ia menjadi sorotan setelah ia mendirikan Hamas (Harokah al-Muqowwamah al-Islamiyah) bersama dengan beberapa pendiri lainnya dan setelah meletusnya *intifadhah*. Selain menjadi pendiri, Syaikh Ahmad Yasin juga merupakan pemimpin spiritual Hamas.

Pembentukan negara Palestina dan pemilihan umum Palestina yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu dan dimenangkan oleh Hamas, merupakan babak baru dalam upaya menuju perdamaian baik bagi Palestina sendiri yang sudah berdiri sebagai negara maupun bagi Israel.

Pemilu demokratis di Palestina pada tanggal 25 Januari 2006 lalu merupakan perang demokratis antara dua kelompok besar di Palestina: Fatah yang moderat tetapi penuh dengan praktek korupsi dan Hamas yang keras yang menjanjikan kemerdekaan penuh bagi rakyat Palestina. Hasil pemilu kemarin memberikan dua gambaran masa depan Timur Tengah yang cukup kontras.

Pertama bahwa pelaksanaan pemilu yang tertib, aman dan demokratis di Palestina menunjukkan adanya kabar menggembirakan bagi kehidupan demokratis di Timur Tengah. Pada saat yang sama, kemenangan Hamas, sebuah organisasi militan Islam di Palestina yang telah dicap sebagai organisasi teroris oleh negara-negara Eropa maupun oleh Amerika Serikat, membawa angin

kekhawatiran dikalangan para pemimpin dunia di negara-negara barat terhadap masa depan Israel dan perdamaian di Timur Tengah.

B. Latar Belakang Masalah

Persengketaan atas sepetak tanah oleh dua kelompok bangsa, Palestina dan Israel, telah berlangsung selama bertahun-tahun sejak bangsa Israel pertama kali menapakkan kakinya di Tanah Palestina. Persengketaan yang berujung pada peperangan itu hingga kini masih belum berakhir.

Konflik ini berakar dari klaim bangsa Israel mengenai kepemilikannya atas tanah Palestina. Dimana menurut keyakinan orang Yahudi, Musa diutus Tuhan untuk membawa kembali bangsa Israel ke Tanah Yang Dijanjikan dan Diberkati Tuhan (*The Promised Land*), setelah mereka berhasil keluar dari kejaran Fir'aun.¹ Meskipun pada awalnya tanah itu tidak diberitahukan dimana tempatnya, tetapi setelah 40 tahun Musa membawa bangsanya mengembara disekitar kawasan Gurun Sinai, akhirnya mereka sampai di tepi sungai (Yordan). Dihadapannya terpampang tanah yang indah dan subur. Itulah Tanah Kana'an (Tanah Palestina) yang mereka yakini sebagai *The Promised Land*. Tetapi ada satu permasalahan, bahwa di atas tanah tersebut sudah ada penghuni yang telah bermukim selama berabad-abad di sana, yaitu bangsa Kana'an dan Filistin (Palestina). Kemudian Musa mengatakan bahwa atas perintah tuhan, maka tanah itu harus direbut.² Inilah salah satu sumber awal dari pertikaian Yahudi (Israel) dengan Palestina.

¹ Sidik Jatmika, *Gerakan Zionis Berwajah Melayu* (Yogyakarta: Wihdah Press, 2001), hal. 5.

² *ibid.*

Jadi secara sederhana dapat dikatakan, bahwa nenek moyang orang Yahudi adalah pendatang (imigran) di Tanah Palestina, sedangkan nenek moyang bangsa Arab Palestina telah terlebih dahulu mendiami wilayah tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Henry Cattan, seorang ahli hukum internasional kelahiran Yerusalem, dalam bukunya "*Palestine, The Arabs and Israel*" (Cattan: 1969). Ia menegaskan bahwa secara ilmiah dan obyektif bangsa Yahudi bukanlah penduduk asli Tanah Palestina.³ Tetapi, meskipun secara logika pendapat itu dapat mematahkan dalil yang selama bertahun-tahun selalu digunakan kaum Zionis Israel dan para pendukungnya, pada kenyataannya tidak dapat membuat Israel menghentikan segala tindakan okupasinya atas Palestina.

Berbagai upaya pun digelar demi mendamaikan perang yang telah mengalirkan darah banyak orang tersebut. Negara-negara tetangga, Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai bahkan negara yang berada di belahan bumi lain (AS dan Uni Eropa) turut berperan dalam upaya perdamaian ini. Beraneka ragam usulan penyelesaian dan tawaran bantuan pun telah diberikan. Sampai kepada pemberian peringatan dan kecaman pun telah disampaikan. Tetapi sampai kini perdamaian belum juga terwujud.

Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai sebuah organisasi yang menaungi hampir seluruh negara di dunia ini, telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi terrealisasinya perdamaian kedua bangsa ini. Telah dikeluarkan puluhan Resolusi Dewan Keamanan untuk mengutuk dan mengecam Israel.

³ Paul Findley, *Mereka Berani Bicara* (Bandung: Penerbit Mizan, 1990), hal. 13.

Tetapi kesemuanya itu tidak membuahkan hasil yang memuaskan bagi perdamaian.

Misalnya, rekomendasi Sidang Umum PBB pada November 1947 (Resolusi No. 181 – Rersolusi Partisi) mengenai pembagian Palestina menjadi sebuah negara Arab dan sebuah negara Yahudi. Sedangkan Yerusalem dan kota-kota sekitarnya, termasuk Betlehem akan dibentuk menjadi kota internasional yang terpisah dan dikendalikan oleh PBB.⁴ Tetapi upaya ini malah dipatahkan oleh Israel dengan memproklamirkan terbentuknya negara Israel pada 14 Maret 1948.

Setelah itu, PBB mulai mengeluarkan resolusi untuk Israel pada 18 Oktober 1948 dengan nama Resolusi Dewan Keamanan No. 59.⁵ Resolusi DK No. 59 itu menyatakan bahwa Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat mengungkapkan keprihatinan PBB kepada Israel yang tidak melaporkan penyelidikan terhadap pembunuhan utusan PBB Count Folke Bernadotte. Tetapi, resolusi ini tidak mendapatkan tanggapan yang berarti dari Israel.

Selanjutnya pada tahun 1951, PBB mengeluarkan Resolusi No. 93 yang memerintahkan Israel untuk menghentikan upayanya mengeringkan rawa-rawa dan Danau Huleh di Galilea Atas. Dan PBB juga memerintahkan Israel untuk memanggil kembali orang-orang Palestina yang diusir oleh pasukan Israel dari zona demiliterisasi.⁶ Tetapi seperti resolusi sebelumnya, resolusi inipun tidak di gubris. Sebagaimana resolusi-resolusi sebelumnya, resolusi-resolusi selanjutnya -

⁴ *ibid.*, hal. 29.

⁵ dalam Maylan Alfiatul Hasanah, "*Kegagalan Dewan Keamanan PBB Dalam Menyelesaikan Konflik Israel-Palestina 1993-2000*" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2003), hal. 73.

⁶ *ibid.*, hal. 74.

seperti Resolusi No. 101 (1953), Resolusi No. 1397, Resolusi No. 1435 (2000), serta masih banyak resolusi-resolusi lainnya – pun tetap tidak juga mampu memberikan angin segar bagi perdamaian Israel-Palestina.

Upaya untuk mendamaikan Israel-Palestina tidak hanya dilakukan oleh PBB yang secara jelas dan sah merupakan organisasi yang diberi mandat oleh bangsa-bangsa di dunia untuk menjaga perdamaian. Melainkan juga dilakukan oleh negara yang memiliki kemampuan dan merasa berkewajiban untuk menjaga perdamaian, seperti Amerika Serikat (AS). AS yang selalu “mengkumandangkan adzan” perdamaian bagi seluruh bangsa di dunia, dan klaimnya sebagai “Polisi Dunia”, “Penjaga Kedamaian”, tentu saja sangat tertarik dan merasa berkewajiban untuk mendamaikan konflik ini.

Keterlibatan AS dalam upaya perdamaian Israel-Palestina pun dirasa cukup signifikan. AS bahkan secara sukarela menawarkan diri untuk menjadi penengah (mediator) dalam perundingan-perundingan kedua negara. Mulai dari KTT Camp David I (1978) hingga Camp David II (2000). Meskipun Camp David I yang berlangsung di Maryland, Amerika Serikat, merupakan sebuah perundingan Israel-Mesir, tetapi memberikan dampak yang besar bagi perjuangan rakyat Palestina. Sikap Mesir yang bersedia berdamai dengan Israel pasca-kekalahannya (Mesir) dalam Perang Yom Kippur (1973), menuai kekecewaan dan kecaman dari orang-orang Arab-Palestina yang menilai Mesir sudah tidak memiliki toleransi lagi terhadap perjuangan bangsa Arab-Palestina dalam masalah pendudukan Israel atas tanah bangsa Arab (Palestina).⁷ Camp David I berakhir

⁷ Sidik Jatmika, *op. cit.*, hal. 78-80.

dengan kematian Anwar Sadat (Perdana Menteri Mesir pada waktu itu). Dan kekecewaan bangsa Palestina terhadap perjanjian yang dituangkan dalam bentuk protes-protes dan gerakan perlawanan terhadap pasukan Israel tersebut, semakin memataikan kesepakatan yang telah dicapai.

Sikap keras kepala dari masing-masing pihak yang bertikai itulah yang menyebabkan proses perdamaian tersendat-sendat. Adanya keengganan masing-masing pihak untuk mengetahui legitimasi keberadaan lawan sebagai suatu entitas, merupakan inti sengketa yang berlarut.⁸ Karena hal itu merupakan syarat untuk mengakhiri perang dengan cara damai. Veto Israel dan penolakan Palestina untuk mengakui keberadaan lawannya adalah yang selama ini menghambat segala kemajuan. Misalnya, penolakan Palestina terhadap Resolusi PBB No. 242 dan 338 –yang secara tersirat mengakui hak hidup Israel dan menyetujui upaya untuk mengubah permusuhan menjadi hubungan damai- mendapat reaksi dari AS. Dimana pada tanggal 25 Januari 1986, AS telah berjanji kepada Raja Husein, bahwa AS akan membantu upaya perundingan dengan Israel hanya apabila Palestina mau menerima Resolusi PBB No. 242 dan 338, serta menolak segala bentuk terorisme.⁹

Kesadaran bangsa Arab-Palestina akan posisi AS sebagai satu-satunya negara yang mampu membuat Israel henggang dari wilayah-wilayah Arab yang didudukinya, serta ketegasan AS yang menjamin tidak akan membiarkan Israel mencaplok wilayah-wilayah itu lagi, turut mempengaruhi PNC (Kongres Nasional Palestina) untuk menerima resolusi-resolusi PBB itu. Sikapnya ini kemudian

⁸ Kirdi Dipoyudho, "Perkembangan Menuju Perdamaian Arab-Israel", *Analisis CSIS*, XVIII (September, 1989), hal. 463.

⁹ *ibid.*, hal. 470.

direalisasikan dengan memproklamasikan kemerdekaannya pada 15 November 1988. Dengan adanya sedikit kemajuan ini, diharapkan dapat membawa titik terang menuju perundingan selanjutnya untuk kemudian mengakhiri konflik.

Pasca-proklamasi Palestina pada 1988 itu, kemudian digelar kembali upaya perundingan selanjutnya. Pertemuan kedua negara pada 30 Oktober 1991 di Madrid (Konfrensi Madrid), dihadiri selain dari delegasi Israel dan Palestina, juga melibatkan Suriah, Yordania, dan Libanon. Perundingan yang berlangsung sampai sebelas putaran (memakan waktu hampir satu setengah tahun) itu, tidak menghasilkan kesepakatan yang berarti.¹⁰ Ini diakibatkan oleh kedua pihak yang masih diliputi dengan emosi untuk tetap mempertahankan pendapatnya masing-masing. Ditambah lagi dengan tidak netralnya sikap AS sebagai penengah dalam perundingan ini, membuat upaya perundingan ini mengalami kegagalan.¹¹

Kemudian dilanjutkan lagi dengan Perundingan Oslo I dan Oslo II. Perundingan yang ditandatangani tanggal 13 September 1993 (Oslo I) itu merupakan upaya penyelesaian konflik dengan cara pembentukan dua negara di satu wilayah atau dalam istilahnya dikenal sebagai "*a two way state solution*" (*A Two Way State Settlement*).¹² Perundingan Oslo I ini berisi tentang pembentukan Dewan Palestina dan Polisi Palestina, serta penarikan mundur pasukan Israel dari

¹⁰ Dirjen HUBSOSBUDPEN, "Direktorat PULLAHTA" (Maret, 1995), hal. 2-9 dikutip oleh Sujondi, "Proses Perdamaian Palestina-Israel" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2002), hal. 45-46.

¹¹ Siti Mutiah Setiawati, "Hambatan Pelaksanaan Deklarasi Prinsip-Prinsip sebagai Resolusi Konflik Palestina-Israel" (Laporan Penelitian Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1996), hal. 5-6.

¹² Alasdair Drysdale, dan Gerald H. Blake, *The Middle East and North Africa: A Political Geography*, hal. 85 dikutip oleh Siti Mutiah Setiawati, *op. cit.*, hal. 8-9.

wilayah Jalur Gaza dan Jericho dalam waktu empat bulan setelah penandatanganan perjanjian damai tersebut.

Namun implementasi perundingan dan berjalannya otonomi terbatas Palestina diwarnai aksi protes dari pihak-pihak penentang di masing-masing negara, sehingga tidak jarang konflik kekerasan pun terjadi. Bahkan pasca-penandatanganan kerjasama keamanan terjadi Tragedi Hebron yang menewaskan puluhan warga Palestina.

Kegagalan Perundingan Oslo I itu mendesak segera dilaksanakannya perundingan tahap selanjutnya. Akhirnya, pada tanggal 28 September 1995 ditandatangani perjanjian perdamaian yang disebut dengan Perjanjian Oslo II. Perjanjian kali ini menetapkan agar Israel menarik diri kurang dari 30% Tepi Barat dan pendirian *Palestine National Authority* (PNA).¹³ Meskipun dalam perjanjian ini pemberian otonomi terbatas Palestina diperluas menjadi tujuh kota Tepi Barat, yaitu Jenin, Nablus, Tulkarem, Qalqilyah, Ramallah dan Bethlehem, serta sebagian Hebron, tetapi hasil perundingan ini masih belum memperlihatkan adanya status pasti bagi Palestina. Sehingga, tidak ubahnya Oslo I, perjanjian kali inipun diwarnai oleh aksi protes. Baik yang dilakukan oleh Hamas (*Harakah al Muqawamah al-Islamiyah-Palestina*), maupun oposisi pemerintah Israel, Partai Likud.

Tetapi upaya perdamaian masih terus dilanjutkan, misalnya dengan ditandatanganinya kembali perjanjian damai kedua pihak tanggal 15 Oktober 1998 di Wye River Centre, Amerika Serikat. Seperti biasa, perundingan inipun diwarnai

¹³ Reeva S. Simon et. Al., *Encyclopedia of Women Middle East* (New York, Macmilian, 1995), Vol. II & III, hal. 904 dikutip oleh Sujondi, *op. cit* , hal. 56.

dengan perdebatan alot bersamaan dengan aksi pemblokadean jalan penghubung di kota-kota Tepi Barat oleh orang-orang Yahudi. Meskipun begitu, akhirnya Israel dan Palestina bersedia menandatangani memorandum Wye River.¹⁴ Kesepakatan yang pada intinya mendesak Israel untuk menyerahkan 13 persen wilayah Tepi Barat, dan membentuk Komite Bersama untuk membahas penarikan mundur pasukan Israel tersebut, serta keharusan Palestina untuk memerangi militan bersenjata anti-Israel. Pembahasan Perundingan Wye River (I dan II) hanya berputar pada masalah Tepi Barat. Sedangkan inti konflik Israel-Palestina mengenai status Yerusalem belum tersentuh sama sekali. Sehingga, gelombang aksi-aksi protes pun muncul kembali.¹⁵

Apapun hasil agenda perdamaian Israel-Palestina, tetap diupayakan baik melalui mediator AS dan dukungan negara-negara Arab lainnya, demi terwujudnya perdamaian di kawasan ini. Itikad baik inilah yang mendasari perundingan-perundingan selanjutnya. Seperti, Perundingan Camp David II yang berlangsung selama lima belas hari sejak tanggal 11 Juli 2000. Sekali lagi, secara esensial perundingan inipun mengalami kegagalan. Karena inti sangketa masih belum juga mendapat kejelasan, yaitu mengenai status Yerusalem.

Semenjak berdirinya pada saat *intifada* pertama kali meletus tahun 1987, menjadi titik tolak peting bagi kelahiran dan sepak terjang Hamas. *Intifada* I ini berlangsung sekitar 5 tahun dari akhir tahun 1987 sampai dengan tahun 1993. Perlawanan-perlawanan rakyat Palestina yang dimotori oleh Hamas selama lima tahun itu cukup menyita perhatian internasional.

¹⁴ Direktorat Jenderal HUBSOSBUDPEN, *Direktorat PULLAHTA*, Jakarta, November, 1998, hal.1-2 dikutip oleh Sujondi, *op. cit.*, hal.59.

¹⁵ *ibid.*, hal. 3.

Kesepakatan Oslo antara Palestina dan Israel mengakibatkan meletusnya *intifada* II. Sejak awal Hamas sudah mencurigai pertemuan Arafat dengan pemerintah Israel sebelum ditandatanganinya Kesepakatan Oslo. Hamas melihat bahwa kesepakatan itu sekalipun terlihat sepintas menguntungkan pihak Palestina karena Jalur Gaza dan Tepi Barat diberikan pada Palestina, namun secara prinsipil Palestina sudah kalah dari Israel. Sebab secara tidak langsung, Palestina telah mengakui keberadaan negara Israel di bumi Palestina.

Memang pada dasarnya, kendala utama bagi penyelesaian konflik ini adalah masalah kedaulatan Yerusalem dan masalah pengungsi Palestina. Karena masing-masing pihak bersikukuh mempertahankan pendapatnya, sehingga konflik ini menjadi semakin rumit dan kompleks.

Pemilu demokratis di Palestina pada tanggal 25 Januari 2006 lalu dimana Hamas menjadi pemenangnya. Kemenangan yang diperoleh Hamas ini tidak sedikit mendatangkan sikap pesimisme¹⁶ dari beberapa negara bagi keberlanjutan proses perdamaian Israel-Palestina karena selama ini Hamas dikenal sebagai suatu organisasi yang menganut garis keras, dan negara-negara Eropa maupun Amerika Serikat telah memberikan cap teroris kepada organisasi Islam di Palestina ini. Tetapi nada optimisme juga banyak muncul dipermukaan. Banyak pihak yang percaya bahwa proses perdamaian Israel-Palestina akan berjalan dengan lancar¹⁷ dibawah pemerintahan Hamas, karena adanya komitmen yang tinggi dari Hamas untuk membawa masyarakatnya kedalam kehidupan yang lebih aman, damai, dan

¹⁶ *Kompas*, 27 Januari 2006

¹⁷ *Media Indonesia*, 27 Januari 2006

lebih makmur. Hal tersebut diperkuat juga oleh berjalannya pemilihan umum yang tertib dan demokratis di Palestina.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang objektif mengenai pengaruh kemenangan Hamas dalam pemilihan umum Palestina pada tanggal 25 Januari 2006 lalu terhadap berlangsungnya proses perdamaian antara Israel-Palestina. Diharapkan dengan diketahuinya pengaruh yang ditimbulkan, dapat diketahui prospek perdamaian Israel-Palestina di masa yang akan datang. Selain itu, penelitian ini juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang politik.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang permasalahan diatas, maka topik permasalahan yang akan coba dianalisa dalam penelitian ini adalah mengenai : *“Bagaimana prospek perdamaian Palestina dan Israel dibawah kepemimpinan Hamas ?”*

E. Kerangka Teori

T. A. Coulombis dan J. H. Wolfe dalam bukunya *“Introduction to International Relations”* (Prentice-Hall, 1986), menjelaskan bahwa kata “teori”

berasal dari bahasa Yunani "*theoro*" yang berarti "melihat kepada".¹⁸ Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Namun karena seringnya timbul perbedaan pengertian tentang definisi teori, maka Mochtar Mas'ood dalam bukunya "*Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*" (LP3ES, 1990) memberikan suatu definisi mengenai teori. Menurutnya, Teori adalah suatu bentuk pernyataan yang menjawab pertanyaan "mengapa".¹⁹ Artinya berteori adalah suatu upaya memberi makna pada fenomena yang terjadi.

Karena berteori adalah pekerjaan untuk mendeskripsikan apa yang terjadi (deskripsi), mengapa sesuatu itu terjadi (eksplanasi), dan meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian tersebut di masa yang akan datang (prediksi). Maka untuk mengetahui pengaruh dan upaya yang dilakukan Hamas sebagai pemenang pemilu Palestina 25 Januari lalu terhadap proses perdamaian Israel-Palestina, penulis akan mencoba menggunakan konsep Resolusi Konflik dan teori Diplomasi sebagai unit analisa.

Konsep Resolusi Konflik

Menurut Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse dalam bukunya "*Contemporary Conflict Resolution*" (terjemahan), Resolusi Konflik adalah :

"Istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang dalam berakar akan diperhatikan dan diselesaikan. Ini mengimplikasikan

¹⁸ Theodore A. Coulombis dan J. H. Wolfe, *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power*, terj. Drs. Mercedes Marbun (Bandung: CV. Putra A. Bardin, 1999), hal. 30.

¹⁹ Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Yogyakarta : LP3ES, 1990), hal. 186.

bahwa perilakunya tidak lagi penuh dengan kekerasan, sikapnya tidak lagi membahayakan dan struktur konfliknya telah diubah.”²⁰

Definisi resolusi konflik yang diberikan di atas mungkin terdengar ambigu, tetapi seperti yang dikatakan oleh H. Miall, O. Ramsbotham dan T. Woodhouse, bahwa: “adalah sulit untuk menghindari ambiguitas karena istilah-istilah yang digunakan disini merujuk pada proses (atau tujuan) untuk melakukan perubahan-perubahan, dan merujuk pada penyelesaian proses.”²¹

Sehingga secara sederhana dikatakan bahwa resolusi konflik adalah suatu upaya untuk menyelesaikan atau mengakhiri atau paling tidak untuk mengurangi resiko dan bahaya eskalasi kekerasannya. Meskipun terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai definisi konsep-konsep perang dan konflik, tetapi mungkin definisi berikut dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau landasan dalam menganalisa permasalahan ini. Lewis A. Coser memberikan definisi konflik sebagai: “*A struggle over values and claims to scarce status, power, and resources in which the aims of the opponents are to neutralize, injure, or eliminate their rivals*”.²² Atau sebagaimana definisi konflik yang dikemukakan oleh Miall dan kawan-kawan, dimana konflik diartikan sebagai sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan.²³

²⁰ Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, *Resolusi Konflik Kontemporer*, terj. Tri Budhi Satrio (Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa, 2000), hal. 31.

²¹ *ibid.*

²² dalam James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff Jr, *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey* (United States: Addison-Wesley Educational Publisher Inc, 1997), hal. 179.

²³ Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, *op. cit.*, hal. 7-8.

Jadi pada intinya, konflik mengacu pada sebuah kondisi yang melibatkan interaksi-interaksi antar manusia demi mencapai tujuan-tujuan yang saling bertentangan.²⁴ Baik tingkatan konflik individual (intrapersonal), antar individu (interpersonal), antar masyarakat, maupun sampai ke tingkatan negara atau berwujud perang. Dimana definisi perang itu sendiri adalah permusuhan antara negara atau didalam wilayah suatu negara yang dilakukan dengan menggunakan sarana kekuatan bersenjata.²⁵ Dengan penjelasan mengenai beberapa faktor atau kondisi utama yang dapat mempercepat terjadinya konflik senjata (perang), sebagaimana yang dikemukakan oleh Coulombis dan Wolfe, yaitu: Agresi Manusia, Fatalisme Elit dan Rakyat serta kesalahan-kesalahan persepsi, Konspirasi Kelompok Kecil, Imperialisme Ekonomi, Ekspansionisme dan Irredentisme Nasionalis, Ketidakesesuaian Sistemik, dan Siklus Umum Sejarah.²⁶

Konsep resolusi konflik dalam hal ini dapat digunakan karena konflik antara Israel dan Palestina yang telah berlangsung cukup lama, mudah sekali mengalami atau terjadi perubahan dalam eskalasi konfliknya. Seperti gagalnya upaya perdamaian yang coba ditempuh oleh kedua pihak ini melalui berbagai perundingan untuk mencapai kata sepakat, selalu saja mengalami hambatan dan tidak jarang berakhir dengan kebuntuan (*deadlock*).

Dari sini dapat kita lihat pembuktian dari teori konflik, dan perang yang dikemukakan oleh para ahli sebagaimana telah diutarakan sebelumnya. Selain itu dalam menyikapi permasalahan ini, mungkin ketujuh faktor atau penyebab utama

²⁴ Dougherty dan Pfaltzgraff, *op. cit.*, hal. 198.

²⁵ Jack C. Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, terj. Drs. Wawan Juanda (Bandung : Putra A. Bardin, 1990), hal. 171.

²⁶ Coulombis dan Wolfe, *op. cit.*, hal. 198.

perang yang dikemukakan oleh Couloumbis dan Wolfe telah mendasari konflik yang terjadi. Tetapi mungkin ada beberapa diantaranya memegang peranan lebih besar dan menentukan, yaitu adanya upaya ekspansi dari pihak Israel terhadap wilayah Palestina. Serta adanya konspirasi dari kelompok-kelompok yang berkepentingan, juga tidak dapat dipungkiri kenyataannya.

Berbagai upaya perdamaian melalui perundingan-perundingan telah digelar, namun perdamaian masih juga belum terwujud. Salah satu penyebabnya adalah karena tidak tercapainya syarat-syarat negosiasi. Negosiasi diartikan sebagai suatu proses dimana pihak-pihak yang bertikai mencari cara untuk mengakhiri atau menyelesaikan konflik mereka.²⁷ Sedangkan, Herbert C. Kelman, mengatakan bahwa keberhasilan suatu perundingan (negosiasi) akan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: adanya momentum yang tepat dan adanya komitmen untuk saling mengakui eksistensi masing-masing (*acknowledgement*).²⁸

Momentum yang tepat bagi suatu perundingan akan sangat tergantung pada prinsip dan pragmatis (*principle and pragmatism*). Artinya sebelum memasuki perundingan, pihak-pihak yang berunding harus telah sepakat terlebih dahulu mengenai hal-hal yang prinsipil -yang menjadi sengketa inti- mereka. Untuk mencapai kesepakatan yang prinsip ini, maka diperlukan suatu komitmen (*commitment*) atau tanggung jawab moral untuk saling menerima dan memberi prinsip-prinsip yang mereka sengketa secara timbal-balik. Inti dari komitmen ini yaitu adanya dimensi moral dari pihak-pihak yang bersengketa untuk bersedia berunding dan mentaati hasil perundingan. Selama belum ada kesepakatan, maka

²⁷ H. Miall, O. Ramsbotham, dan T. Woodhouse, *op. cit.*, hal. 31.

²⁸ Siti Muti'ah Setiawati, *op. cit.*, hal. 13-16.

berarti belum saatnya mereka maju dalam perundingan, artinya *momentnya* belum tepat. Sedangkan *pragmatism* (pragmatisme) merupakan syarat untuk mencapai perdamaian. Atau menurut Kelman, "*Pragmatism is a 'sine qua non' for a mutually acceptable peace*". Artinya perundingan itu harus pragmatis atau mudah dilaksanakan dan menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, sehingga perdamaian dapat terwujud.

Syarat kedua keberhasilan negosiasi adalah adanya komitmen untuk saling mengakui eksistensi masing-masing (*acknowledgement*). Saling mengakui eksistensi kebangsaan atau negara-negara masing-masing, biasanya akan dapat menjembatani hal-hal yang tidak pasti yang menjadi inti sengketa mereka. Untuk itu, syarat pengakuan itu bersifat *resiprocal* (timbang-balik). Konflik Israel-Palestina tiada akan pernah berhenti selama masing-masing pihak belum mengakui keberadaan lawannya. Hal inilah yang membuat buntu segala upaya perundingan.

Kemudian, pengakuan juga harus dinyatakan dengan sengaja dan eksplisit (*deliberate and explicit*). Artinya bahwa pengakuan ini tidak boleh dinyatakan secara terselubung dan implisit, sehingga pihak lawan atau masyarakat tidak mengetahui karena ketidakjelasan pengakuan juga harus *feasible*, artinya menawarkan sesuatu yang baru bagi masa depan kedua belah pihak. Serta harus menenteramkan pihak lain yang diberi pengakuan tanpa membahayakan yang memberi. Dan yang terakhir, pengakuan harus dirumuskan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama guna memenuhi kehendak masing-masing tanpa harus membahayakan kepentingan pihak lainnya.

Dalam proses negosiasi, beberapa unsur atau syarat yang harus ada yaitu; (1) Tawar-menawar secara langsung antara perwakilan dari pihak yang bertikai, (2) Konsentrasi terhadap masalah substansif, tanpa banyak usaha untuk mengerahkan tujuan, motivasi atau persepsi dari kedua pihak, (3) suatu asumsi bahwa konflik merupakan tipe konstan dan fungsi negosiator adalah untuk mencapai kemenangan sebanyak mungkin, (4) sebuah proses yang didasarkan pada pertukaran konsesi atau kompromi dari hal yang bertentangan, (5) proses yang mengikuti tindakan dan aksi tanggapan dari luar proses negosiasi yang dirancang untuk menempatkan seorang delegasi dalam posisi keunggulan yang besar atau sedikit kerugian, dan mempengaruhi delegasi lain terhadap masalah yang bertentangan.²⁹

Dalam proses mediasi terdapat adanya campur tangan pihak ketiga, unsur ini melibatkan jenis badan yang berbeda (organisasi internasional, negara, LSM, individual), untuk menangani kelompok yang berbeda, dan kelompok lainnya yang mempunyai beragam bentuk, daya tahan, dan tujuan.

Pihak-pihak yang bersengketa bersama-sama bersepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan "nasihat-nasihat"-nya tentang bagaimana sebaiknya menyelesaikan perselisihan mereka.³⁰

Mediasi biasanya penting pada sebuah tahapan ketika paling tidak sejumlah pihak-pihak yang bertikai harus menerima kenyataan bahwa melanjutkan konflik tampaknya tidak akan membuat mereka mencapai tujuan.

²⁹ Chris Mitchell, *The Structure of International Conflict*, Macmillan, London, 1981

³⁰ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 1994), hal. 90.

Fungsi yang paling penting dari mediator adalah untuk memulihkan komunikasi di antara para pihak yang berselisih, mendinginkan suasana, menyelidiki keadaan di wilayah konflik dan jika perlu memberikan beraneka jasa kepada para pihak yang berkonflik.³¹

Peran dan tugas mediator sangat rumit, dan prakarsa serta strategi perundingan yang diterima mediator itu sangat bervariasi dari kasus ke kasus. Intervensi berkisar dari meneruskan pesan di antara kedua belah pihak untuk terlibat aktif dalam perundingan dan mencoba menekankan kepada pihak-pihak yang bermusuhan untuk menerima usul-usul perdamaian yang telah dirumuskan oleh mediator itu sendiri. Dengan demikian, semua kegiatan pihak ketiga dapat bervariasi sepanjang sejumlah dimensi, seperti informalitas, keekstensifan sumber daya yang terikat, kelangsungan perembesan ke dalam perundingan, dan identitas.³²

Relevansi dari teori dan konsep yang telah dipaparkan sebelumnya dengan permasalahan yang ada adalah bahwa konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina bermula dari upaya keduanya untuk mencapai kepentingan masing-masing yang saling bertentangan, yaitu masalah hak dalam wilayah kenegaraan. Berbagai upaya perdamaian yang telah ditempuh terus mengalami hambatan. Baik hambatan yang berasal dari internal kedua pihak yang bertikai, maupun karena adanya faktor eksternal yang turut mempengaruhi berlarutnya konflik.

Bangsa Israel berjuang untuk memperoleh wilayah-wilayah mereka yang telah dijanjikan Tuhan. Dan melakukan segala upaya guna merealisasikan cita-cita

³¹ K. J. Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*, Penerbit Erlangga, hal. 192.

³² Young, *The Intermediaries* dalam K. J. Holsti, *ibid.*

mereka, yaitu terbentuknya “Israel Raya”. Hal ini sangat bertentangan dengan bangsa Palestina yang secara *de-facto* telah berada cukup lama dan mendiami wilayah yang dipersengketakan itu jauh sebelum kedatangan bangsa Israel. Masing-masing mereka tentu saja akan terus berjuang untuk mempertahankan apa yang menurut mereka adalah haknya.

Kemenangan Hamas dalam pemilihan umum Palestina pada akhir Januari lalu banyak mendatangkan kekhawatiran dari banyak pihak. Hal tersebut dikarenakan Hamas dianggap sebagai organisasi yang beraliran garis keras dan gencar melakukan perlawanan terhadap Israel. Hal itu tentu saja akan mempersulit upaya perdamaian antara Israel dan Palestina. Untuk memperlancar upaya perdamaian itu, mau tidak mau Hamas sebagai organisasi yang berhak untuk membentuk pemerintahan di Palestina harus mengubah arah atau haluan politiknya. Sebagai kekuatan mayoritas di parlemen Palestina, Hamas harus berubah menjadi sebuah partai pemerintah, yang dapat melakukan dialog, demikian komentar harian Austria **Kurier** yang terbit di Wina.

“Situasinya mengingatkan kembali pada tahun 70-an, dimana dalam waktu lama tidak ada yang mau berdialog dengan Gerakan Fatah, yang dicap sebagai kelompok teroris. Sekarang semua menyadari, politik riil memerlukan dialog. Jadi, seperti dulu Gerakan Fatah, Hamas juga harus berubah. Terutama jika kelompok ini nanti harus menjadi pemegang tanggung jawab di parlemen. Pertanyaannya kini, apakah Hamas akan menghentikan aksi serangannya, dan mengintegrasikan kelompok bersenjata ke dalam polisi Palestina? Jika langkah ini tidak dilakukan, berarti Palestina memilih isolasinya sendiri. Bahkan kemungkinan terburukpun tidak tertutup, yaitu pecahnya perang saudara antara Hamas melawan Fatah.”³³

³³ www.dw-world.com.

Harian Perancis **Presse de la Manche** yang terbit di Cherbourg menulis, Hamas harus mengubah strategi, dari terorisme menjadi diplomasi.

"Hamas harus mengubah diri menjadi partai pemerintah, yang dapat melakukan perundingan dengan Israel. Hal itu berarti, pada momentum tertentu, Hamas harus mengakui dan menerima keberadaan sebuah negara Israel. Hal semacam itu telah dilakukan sebelumnya oleh Gerakan Fatah dari Yasser Arafat. Inilah persyaratan bagi pengakuan eksistensi Hamas sendiri, di dalam sebuah negara Palestina di masa depan."³⁴

Upaya untuk merubah arah haluan politik memang perlu dilakukan oleh Hamas untuk semakin memperlancar upaya perdamaian dengan Israel. Tetapi upaya perdamaian tidak akan berjalan lancar tanpa adanya sinergi antara pihak-pihak yang bertikai -dalam hal ini Israel dan Palestina- untuk bersama-sama mengupayakan perdamaian, tidak hanya upaya dari salah satu pihak saja.

F. Hipotesa

Dengan melihat permasalahan serta dikaitkan dengan kerangka pemikiran yang telah ditetapkan, maka kesimpulan sementara yang dapat ditarik adalah bahwa prospek perdamaian Israel-Palestina pasca kemenangan Hamas pada pemilu legislatif Palestina yang lalu menjadi sedikit suram karena :

- Penolakan terhadap berdirinya negara Israel oleh Hamas
- Israel tidak mengakui kemenangan Hamas dan menolak melakukan negosiasi dengan Hamas
- Mediator internasional tidak mengakui kemenangan Hamas

³⁴ *ibid.*

G. Jangkauan Penelitian

Dengan maksud agar pembahasan tidak terlalu meluas dan penyelesaiannya menjadi lebih kongkrit, maka penulis akan memberikan batasan terhadap penelitian ini dari tahun 2005 sampai dengan 2006, yang merupakan rentang waktu persiapan pelaksanaan pemilihan umum parlemen di Palestina pada tahun 2005, dan pada tahun 2006 merupakan waktu pelaksanaan pemilihan umum dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemenang pemilihan umum tersebut, yaitu Hamas, untuk mengupayakan perdamaian dengan Israel. Pembahasan juga akan menyinggung upaya-upaya perdamaian yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, yang mempengaruhi upaya perjanjian perdamaian pada masa selanjutnya.

H. Metode Penelitian

Dalam penyusunan atau penulisan skripsi ini, penulis lebih menitikberatkan pada studi kepustakaan. Dengan studi kepustakaan ini penulis berharap nantinya bisa menemukan data-data dan fakta-fakta yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Sumber data kepustakaan yang penulis gunakan berasal dari berbagai literatur, buku, laporan penelitian, jurnal, situs internet, dan sumber-sumber lainnya yang sekiranya bisa dipergunakan untuk mengupas masalah ini. Sedangkan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah eksplanasi dan prediksi, dalam artian skripsi ini akan mencoba memberikan penjelasan dan meramalkan atau memperkirakan bagaimana prospek perdamaian Israel-Palestina pada masa yang akan datang.

I. Sistematika Penulisan

Dengan maksud untuk membahas permasalahan ini secara sistematis, maka penulis menyusun skripsi ini menjadi 5 (lima) bagian, yaitu :

BAB I merupakan pendahuluan yang menguraikan mengenai pokok-pokok penting dalam penulisan sebuah skripsi, yang meliputi: alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, tujuan penelitian, perumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II akan membahas mengenai dinamika konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina, dari asal-mula terjadinya konflik sampai peperangan yang telah terjadi dari masa ke masa. Serta upaya-upaya yang ditempuh kedua pihak dalam rangka mewujudkan perdamaian di wilayah itu, mencakup berbagai perundingan-perundingan yang telah digelar.

BAB III akan membahas mengenai asal mula lahirnya Hamas sebagai suatu organisasi pembebasan Palestina disamping PLO dimulai dari *intifada* pertama dan kedua sampai kepada terbentuknya Hamas, maupun strategi-strategi politiknya. Bab ini juga akan melihat posisi Hamas dan PLO sebagai dua organisasi perlawanan besar di Palestina.

BAB IV dalam bab ini akan dibahas mengenai apa yang menjadi pokok permasalahan dalam kajian ini, yaitu mengenai dampak kemenangan Hamas dalam pemilihan umum di Palestina terhadap proses perdamaian Israel dan Palestina, termasuk upaya-upaya yang dilakukan oleh Hamas sebelum pemilihan

umum dilakukan sampai kepada upaya-upaya yang dilakukannya setelah Hamas memenangi pemilihan umum di Palestina yang membawa dampak besar bagi upaya terciptanya perdamaian Israel-Palestina di masa depan.

BAB V merupakan kesimpulan yang memberikan kesimpulan umum dari pembahasan yang tertuang dalam bab-bab sebelumnya.